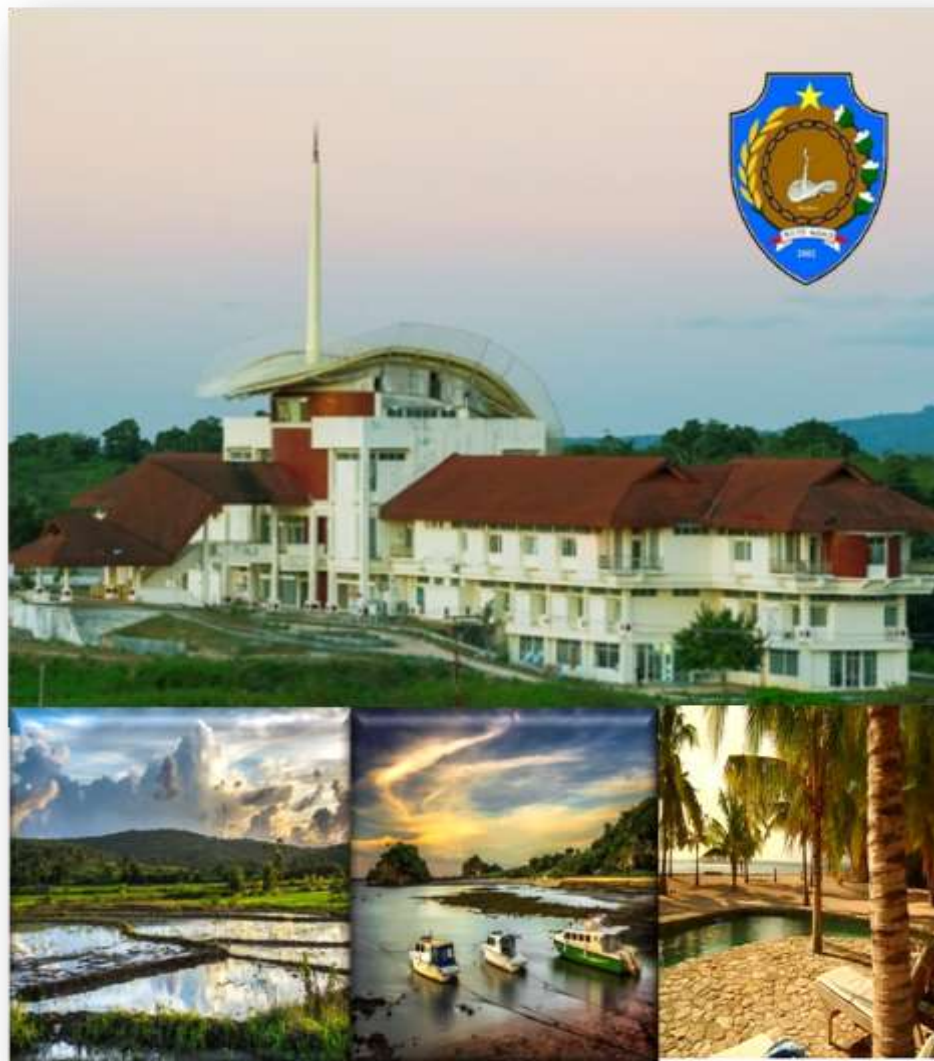


**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
TAHUN 2019**



**BAGIAN ORTA
SETDA KABUPATEN ROTE NDAO**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat dan karuniaNya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 dapat diselesaikan tepat waktu. Sebagai media pertanggung jawaban kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Organisasi dan Tatalaksana Kabupaten Rote Ndao akan menyajikan capaian kinerja dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang di dalamnya berisi informasi tentang uraian pertanggung jawaban mengenai keberhasilan ataupun kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran strateginya dalam rangka pencapaian visi dan misi yang dijabarkan melalui program-program pembangunan.

LKIP juga merupakan sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih, bebas dari KKN akan menjadi umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pada tahun berikutnya.

Laporan Kinerja Instansi Bagian Organisasi dan Tata Laksana Kabupaten Rote Ndao disusun berdasarkan realisasi kinerja yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2019 berisi tentang analisis pencapaian sasaran serta pengukuran atas sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategik Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 untuk tahun pelaksanaan 2019.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019, kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam menyajikan informasi kinerja secara lengkap dan sempurna. Untuk itu semua masukan berupa saran dan kritik konstruktif dari berbagai pihak kami menyambut baik.



Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Organisasi dan TatalaksanaSetda Kabupaten Rote Ndao menjadi media informasi tentang pelaksanaan pembangunan dan menjadi bahan evaluasi kinerja demi pencapaian dan kesinambungan pembangunan demi kesejahteraan rakyat.

15 Januari 2020

Kabag Organisasi dan Tatalaksana,

Setda Kab. Rote Ndao



Drh. Adrijan Yus, M.Si

Perbina Tk.I

NIP. 19640528 199203 1 004



IKTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan Visi Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Rote Ndao sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategik Tahun 2014 – 2019 yaitu, maka berbagai kebijakan, program dan kegiatan diimplementasikan.

Untuk itu, sebagai wujud pertanggung jawaban kinerja terhadap apa yang menjadi komitmen dan tekad Bagian Organisasi dan Tatalaksana yang tertuang dalam RENSTRA dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019, maka Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Rote Ndao menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2019, sebagai bentuk aplikasi dari penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memuat tentang capaian kinerja sasaran dengan indikator-indikator yang jelas dan terukur.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dijelaskan keberhasilan dan kegagalan serta hambatan-hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan pembangunan. Selain itu, strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang juga dijelaskan secara rinci agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan.

Pencapaian kinerja sasaran Bagian Organisasi dan Tata Laksana Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 dapat digambarkan sebagai berikut :

NO	S A S A R A N	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)	SKALA ORDINAL
1.	Meningkatnya Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	100	Sangat Berhasil
2.	Terciptanya profesionalisme dan disiplin kerja aparatur dalam mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik	100	Sangat Berhasil



3.	Terpenuhinya administrasi Standar Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	133	Sangat Berhasil
----	--	-----	-----------------

Walaupun secara keseluruhan capaian kinerja sasaran tercapai dan berhasil namun masih ada kendala-kendala yang dihadapi seperti :

1. Terbatasnya sarana dan prasarana;
2. Kurangnya kesadaran Perangkat Daerah untuk menyusun Standar Pelayanan Publik;
3. Kurangnya pemahaman kesadaran Perangkat Daerah untuk menyusun Standar Pelayanan Minimal.

Terhadap kendala-kendalah permasalahan yang dihadapi diupayakan dilakukan perbaikan dari tahun ke tahun untuk pencapaian sasaran kinerja.

Perjanjian kinerja sasaran tahun 2019 memberikan kontribusi terhadap kinerja Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Rote Ndao.

15 Januari 2020

Kabag Organisasi dan Tatalaksana
Setda Kab. Rote Ndao



Drh. Adriyan Yus, M.Si

Bimbina Tk.I

NIP. 19640528 199103 1 004



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1-2
Ikhtisar Eksekutif	3-5
Bab I	Pendahuluan	7
	A. Pendahuluan	7
	B. Maksud Tujuan	8
	C. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi	9
	D. Dasar Hukum	14
	E. Sistematika Laporan
Bab II	Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja	17
	A. Rencana Strategis Bagian Organisasi dan Tatalaksana Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014-2019	17
	1. Pernyataan Visi dan Misi
	2. Penetapan Tujuan, Sasaran, Strategi & Kebijakan	19
	B. Perjanjian Kinerja Bagian Organisasi dan Tatalaksana Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019	25
Bab III	Akuntabilitas Kinerja	26
	A. Akuntabilitas Kinerja Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Rote Ndao
	B. Realisasi Anggaran	34
Bab IV	Penutup	35



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat guna mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk dapat mewujudkan penyelenggara negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab yang dilaksanakan secara efektif, efisien, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam kerangka pembangunan *good governance*, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Orientasi pada input, terutama uang seperti yang selama ini dijalankan, hendaknya sudah harus bergeser dari pola pikir berapa besar dana yang telah dan akan dihabiskan menjadi berapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada kesejahteraan masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. *Output* merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedang *outcome* adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberi manfaat bagi masyarakat.

Untuk itu, maka Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kab. Rote Ndao berkewajiban mempertanggungjawabkan kepada pihak yang memberikan amanah. Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Organisasi & Tatalaksana Setda Kabupaten Rote Ndao.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini akan menjelaskan tentang capaian dan informasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan secara mendetail sebagai masukan yang sangat bermanfaat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Bagian Organisasi & Tatalaksana Setda Kab. Rote Ndao pada masa mendatang.



B. MAKSUD DAN TUJUAN

➤ **Maksud**

Adapun Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Organisasi dan Tata Laksnana Setda Kab. Rote Ndao adalah untuk :

1. Menggambarkan sejauh mana capaian kinerja Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Rote Ndao selama Tahun 2019 sesuai dengan kinerja yang telah diperjanjikan.
2. Sebagai bahan evaluasi bagi pimpinan Perangkat Daerah dan pimpinan instansi yang lebih tinggi tentang keberhasilan yang di capai serta upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi;
3. Merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Bagian Organisasi Setda Kab. Rote Ndao sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

➤ **Tujuan**

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Organisasi dan Tata laksana Setda Kab. Rote Ndao Tahun 2019 berpatokan pada 3 (tiga) aspek utama sebagai berikut:

1. **Aspek Akuntabilitas Kinerja** yaitu sebagai sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh dan dilaksanakan selama tahun 2019.
2. **Aspek Manajemen Kinerja** yaitu sebagai media untuk mendapat umpan balik terhadap setiap keberhasilan dan atau kegagalan kinerja yang ditemukan, sehingga kedepan dapat dirumuskan strategi dan pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kab. Rote Ndao dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.
3. **Aspek penerapan SAKIP** yaitu untuk mendorong menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara benar sehingga terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.



C. GAMBARAN UMUM

Tugas pokok dan fungsi Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Rote Ndao sesuai Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 21 Tahun 2017 sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

Bagian Organisasi dan Tatalaksana mempunyai tugas pokok membuat rencana operasional di Bagian Organisasi dan Tatalaksana, membagi tugas, memberi petunjuk, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Sub Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik dan Sub Bagian Peningkatan Kinerja dan Refromasi Birokrasi.

2. Fungsi

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Rote Ndao mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan operasional Bagian Organisasi dan Tatalaksana;
- b. Pelaksanaan kebijakan operasional di Bagian Organisasi dan Tatalaksana;
- c. Pembagian tugas, pemberian petunjuk dan pengarahan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bagian Organisasi dan Tatalaksana sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao sebagaimana di maksud dalam Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 40 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao.

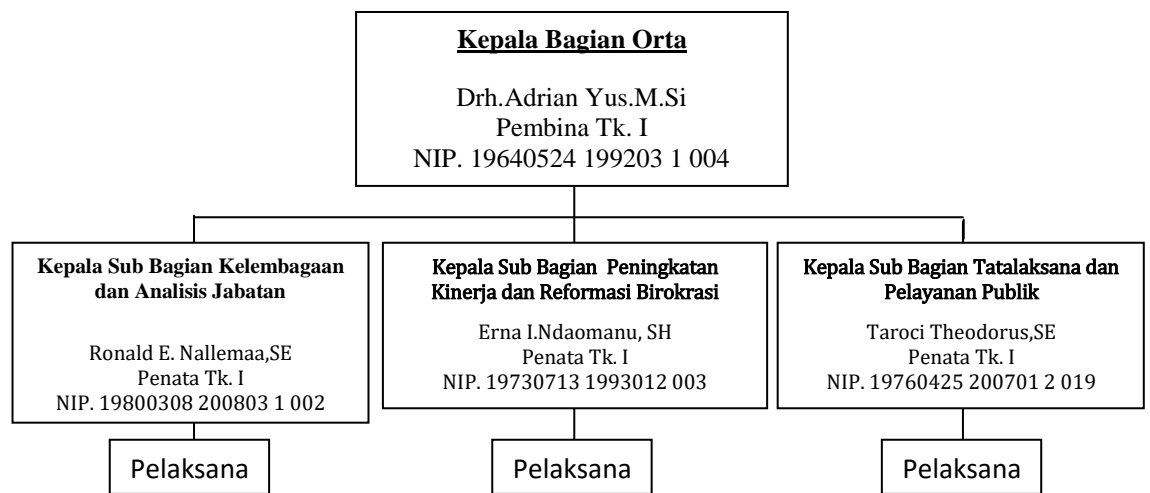
- a. Struktur Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Rote Ndao terdiri dari :
 1. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kab. Rote Ndao (terisi)
 2. Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan (terisi)
 3. Kepala Sub Bagian Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (terisi)



4. Kepala Sub Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik (terisi)
5. Pelaksana sejumlah 8 orang

Struktur Organisasi Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Rote Ndao terlihat pada tabel berikut:

Bagan Struktur Organisasi



Gambar 1.1 Bagan Struktur Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao (*Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016*)

b. Sumber Daya Manusia

Adapun Jumlah Kekuatan Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Rote Ndao keadaan Pegawai Negeri Sipil saat ini berjumlah 12 orang yang terdiri dari 6 orang laki-laki dan 6 orang perempuan.

Bagian Organisasi Setda Kabupaten Rote Ndao mempunyai pegawai sebanyak 12 Orang dengan perincian berdasarkan struktur dan tingkat pendidikan sebagai berikut :



Tabel Tabel. 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan dan Jenis Kelamin Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Rote Ndao

NO	PANGKAT	PANGKAT	JENIS KELAMIN		JUMLAH
			L	P	
1	I/a	Juru Muda	0	0	0
2	I/b	Juru Muda Tk. I	0	0	0
3	I/c	Juru	0	0	0
4	I/d	Juru Tk. I	0	0	0
Jumlah Golongan II			0	1	1
6	II/a	Pengatur Muda	0	0	0
7	II/b	Pengatur Muda Tk.I	0	0	0
8	II/c	Pengatur	0	1	0
9	II/d	Pengatur Tk.I	0	0	0
Jumlah Golongan III			5	5	10
10	III/a	Penata Muda	3	2	6
11	III/b	Penata Muda Tk.I	1	1	1
12	III/c	Penata	0	0	0
13	III/d	Penata Tk.I	1	2	3
Jumlah Golongan IV			1	0	1
14	IV/a	Pembina	0	0	0
15	IV/b	Pembina Tk.I	1	0	1
16	IV/c	Pembina Utama Muda	0	0	0
17	IV/d	Pembina Utama Madya	0	0	0
Total			6	6	12

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari jumlah pegawai 12 orang golongan IV berjumlah 1 orang, golongan III berjumlah 10 orang dan golongan II berjumlah 1 orang. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Bagian organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			L	P
1	S2	1 Orang	1 Orang	-
2	S1	9 Orang	4 Orang	5 Orang
4	SLTA/SMK	2 Orang	1 Orang	1 Orang

Sumber Data Tahun 2016 (Data per Desember)

Dari jumlah tersebut pegawai yang berpendidikan S2 berjumlah 1 orang, S1 berjumlah 9 orang dan SMA berjumlah 2 orang.

Susunan kepegawaian pada Bagian Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Rote Ndao dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 1.3 Daftar Nama PNS Bagian Organisasi & Tatlaksana Setda Kab.Rote Ndao (Data Per Desember 2019)

N O	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN
1	Drh.Adriyan Yus, M.Si NIP. 19630327 198503 1 014	Kepala Bagian IV/b	S2
2	Ronald E. Nallemaa,SE NIP. 19800308 200803 1 002	Kasubag Kelembagaan dan Analisis Jabatan III/d	S1
3	Erna I. Ndaomanu, SH NIP. 19730713 19301 2 003	Kasubag Peningkatan Kinerja & Reformasi Birokrasi III/d	S1
4	Taroci Theodorus,SE NIP.19760425 200701 2 019	Kasubag Tatalaksana & Pelayanan Publik III/d	S1
5	Lyend A. Lenggu, SH NIP. 19850729 200312 2 003	Pelaksana III/b	S1
6	Hendra T. Nitte, SH NIP. 19850426 201503 1 001	Pelaksana III/a	S1



7	Herlinda Lenggu,S,ST NIP.19820312 200604 2 015	Pelaksana III/a	S1
8	Ice Mooy,SH NIP. 19830681 200701 2 007	Pelaksana III/a	S1
9	Rusmin Haupea, S.STP NIP. 19951222 201708 1 001	Pelaksana III/a	S1
10	Sufrandana, S.STP NIP. 19940110 201708 1 001	Pelaksana III/a	S1
11	Markus M.H.Dethan NIP. 19780204 199803 1 001	Pelaksana III/a	SMA
12	Merny M. Pah NIP. 19850529 20071 2 003	Pelaksana II/c	SMA

Disamping tenaga Pegawai Negeri Sipil, pelaksanaan operasional Bagian Organisasi dan Tata Laksanaan dibantu oleh Tenaga Kontrak Daerah sebanyak 4 Orang, dengan rincian sebagai berikut :

- Tenaga Administrasi : 1 Orang
- Penjaga Kantor : -
- Supir : -
- Cleaning Service : -

Jumlah = 1 Orang

a. Sumber pembiayaan yang dikelola oleh Dinas Bagian Organisasi dan Tata Laksana setda Kabupaten Rote Ndao bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.

D. Dasar Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bagian Organisasi Setda Kabupaten Rote Ndao disusun berdasarkan :

1. Ketetapan MPR Nomor 11/ MPR/ 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;



4. Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

E. Sistematika Laporan

LKIP Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Rote disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum, metode penyusunan serta sistematika penyusunan LKIP Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019.

A. Latar Belakang

Menguraikan mengenai ketentuan yang melandasi penyusunan LKIP

B. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan dalam rangka apa disusunnya LKIP dan apa manfaat yang diharapkan dari penyusunan LKIP tersebut.

C. Gambaran Umum SKPD

Menjelaskan secara singkat gambaran umum Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 mengenai struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi organisasi.

D. Dasar Hukum

Menjelaskan mengenai peraturan – peraturan yang mendasari penyusunan LKIP Bagian Organisasi dan Tatalaksana Kabupaten Rote Ndao 2019.

E. Sistematika Laporan



BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis (Renstra Tahun 2014-2019)

Pada bagian ini disajikan gambaran mengenai Renstra Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014-2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

a. Pernyataan Visi dan Misi

1. Visi

Menguraikan mengenai definisi dari visi dan mengungkapkan pernyataan visi Bagian Organisasi dan Tatalaksana setda Kabupaten Rote Ndao beserta kandungan maknanya.

2. Misi

Menjelaskan mengenai definisi dari misi dan menguraikan mengenai pernyataan misi Bagian Organisasi dan Tatalaksana Kabupaten Rote Ndao.

b. Penetapan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

1. Tujuan

Menjelaskan mengenai definisi/makna dari tujuan dan menguraikan seluruh tujuan per masing-masing misi Bagian Organisasi dan Tatalaksana setda Kabupaten Rote Ndao.

2. Sasaran

Menjelaskan mengenai definisi/makna dari sasaran dan menguraikan seluruh sasaran yang ditetapkan pada masing – masing tujuan yang hendak dicapai Bagian Organisasi dan Tatalaksana Kabupaten Rote Ndao.

3. Strategi

Menguraikan Strategi yang dilakukan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan.

4. Kebijakan

Menguraikan kebijakan dan program-program pada masing – masing tujuan dan misi yang telah ditetapkan.



B. Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah 2019

Menguraikan sasaran, indikator kinerja sasaran dan targetnya pada masing – masing indikator kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda
Kabupaten Rote Ndao

Menyajikan hasil pengukuran kinerja masing-masing indikator sasaran dan hasil evaluasi yaitu dengan membandingkan realisasi tahun 2019.

B. Realisasi Anggaran Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda
Kabupaten Rote Ndao

Menyajikan ringkasan anggaran dan realisasi anggaran Tahun 2019 beserta rincian belanja per kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan dari LKIP



BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan Strategis Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014 -2019, dimaksudkan untuk menciptakan komitmen dalam rangka membangun system akuntabilitas dan kinerja sebagai salah satu upaya penerapabn prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (Good Governance), dan juga untuk memberikan arah dan pedoman Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao dalam mencapai Visi dan Misi yang telah disepakati.

Penyusunan Rencana Strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menetapkan bahwa sistem perencanaan pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Salah satu rencana pembangunan yang perlu disusun adalah Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 25 ayat (2) dan (3) yang antara lain menyatakan bahwa Renstra-Perangkat Daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

A. RENCANA STRATEGI BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA SETDA KAB. ROTE NDAO TAHUN 2014-2019

RENSTRA Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao adalah dokumen yang memuat suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada yang mungkin timbul. Penyusunan Renstra disamping mengacu



pada RPJMD, juga perlu memperhatikan evaluasi kinerja Perangkat Daerah terhadap implementasi Renstra pada 5 (lima) tahun sebelumnya.

Pernyataan Visi dan Misi

a. Visi

Berpedoman pada Visi Pembangunan Kabupaten Rote Ndao sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2014–2019, yaitu: “Terwujudnya Kehidupan masyarakat Kabupaten Rote Ndao yang BERMARTABAT (BERTumbuh, MAkmuR, TAat dan BersahaBAT) bertumpu pada pengembangan pariwisata yang didukung oleh pertanian dan perikanan”, dengan melandaskan pada Misi keenam yaitu : “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima”, maka ditetapkan **Visi Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat daerah Kabupaten Rote Ndao, yaitu:**

“Terwujudnya Organisasi Perangkat Daerah Yang Proporsional dan Mampu Memberikan Pelayanan Yang Prima Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih”.

b. Misi

Penetapan Visi diatas dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015-2019, yang berfokus pada misi keenam yaitu **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima** sebagai upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good government*) dan bersih (*clean government*) serta kualitas kebijakan pelayanan publik yang unggul, mampu melaksanakan percepatan implementasi reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan agar tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan di bidang organisasi dan tata laksana melalui peningkatan



kapasitas kinerja aparatur pemerintah daerah yang professional dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

Dalam upaya mencapai visi tersebut, maka Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Rote Ndao menjalankan misi koordinasi, pembinaan, pengendalian pelaksanaan tugas pelayanan Bagian Organisasi melalui :

1. **Peningkatkan ketetalaksanaan dan kinerja aparatur**
2. **Peningkatnya optimalisasi hasil Analisis jabatan dan analisis beban kerja**
3. **Peningkatkan perpustakaan dan kearsipan**

c. **Penetapan Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan**

Berdasarkan Misi tersebut diatas, maka tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Bagian Organisasi dan Tata Laksana dalam 5 tahun kedepan adalah :

MISI 1. MEWUJUDKAN PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH YANG TEPAT UKURAN DAN TEPAT FUNGSI

Tujuan :

Meningkatkan kapasitas organisasi perangkat daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik

Sasaran:

1. Terwujudnya penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Terlaksananya penataan organisasi perangkat daerah secara proporsional, efektif dan efisien

Strategi:

1. Meningkatkan tranparansi, akuntabilitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*)



dan Pemerintahan yang bersih (*Clean Government*);

2. Meningkatkan transparansi dan koordinasi secara internal maupun eksternal dalam pengembangan dan penataan kelembagaan organisasi Pemerintah Kab. Rote Ndao

Kebijakan:

1. Peningkatan tranparansi, akuntabilitas dan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan Pemerintahan yang bersih (*Clean Government*);
2. Pelaksanaan penataan organisasi perangkat daerah secara proporsional, efektif dan efisien;

MISI 2. MEWUJUDKAN KETALAKSANAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH YANG EFEKTIF DAN EFISIEN

Tujuan:

Menciptakan ketatalaksanaan organisasi perangkat daerah secara efektif dan efisien

Sasaran:

Terpenuhinya administrasi standar ketatalaksanaan organisasi perangkat daerah

Strategi:

Melakukan sosialisasi aturan, kebijakan dan prosedur di bidang organisasi dan ketatalaksanaan

Kebijakan:

Penerapan mekanisme, prosedur dan pola kerja yang efektif, efisien dan transparan yang dibakukan untuk mewujudkan pelayanan prima



MISI 3. MEWUJUDKAN IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Tujuan:

Meningkatkan implementasi sistem akuntabilitas kinerja organisasi pemerintah daerah.

Sasaran:

Meningkatnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Strategi:

1. Menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna meningkatkan akuntabilitas kinerja;
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas

Kebijakan:

Pengembangan kinerja organisasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

MISI 4. MEWUJUDKAN APARATUR DAERAH YANG PROFESIONAL, DISIPLIN DAN BERTANGGUNGJAWAB

Tujuan:

Meningkatkan pelaksanaan program dan kebijakan pendayagunaan aparatur negara

Sasaran:

1. Terciptanya profesionalisme dan disiplin kerja aparatur;
2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur

Strategi:

1. Membangun profesionalisme aparatur melalui program pengembangan SDM untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme;
2. Penambahan sumber daya aparatur dalam menjawab tuntutan tugas dan beban kerja;



3. Mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam meningkatkan koordinasi dan pemahaman tugas.

Kebijakan:

Pelaksanaan dan pengelolaan analisis jabatan serta analisis beban kerja pada semua Perangkat Daerah secara berkelanjutan

Untuk mencapai Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan tersebut di atas maka dirumuskan Program dan Kegiatan Strategis sebagai berikut ;

1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Kegiatan dari program ini meliputi :

- a. Penyediaan jasa surat menyurat;
- b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;
- c. Penyediaan jasa administrasi keuangan;
- d. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
- e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;
- f. Penyediaan alat tulis kantor;
- g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
- h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
- j. Penyediaan jasa administrasi perkantoran;
- k. Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas dalam wilayah Provinsi NTT;

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Kegiatan dari program ini meliputi :

- a. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional;

3. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

- a. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
- b. Bimtek Standar Pelayanan Minimal



4. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Kegiatan dari program ini meliputi :

- a. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah
- b. Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah (PK)
- c. Penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) Perangkat Daerah
- d. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
- e. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Capaian Kinerja SKPD
- f. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP)
- g. Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Rote Ndao.

B. PERJANJIAN KINERJA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA SETDA KAB. ROTE NDAO TAHUN 2019

Perjanjian Kinerja merupakan tekat dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai antara pihak yang menerima amanah/tanggungjawab kinerja dengan pihak yang memberi amanah/tanggung jawab. Dengan demikian Perjanjian kinerja merupakan tekat dan janji Kinerja Tahunan yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan Perangkat Daerah karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan dan perjanjian kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan Perangkat Daerah akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan yang tidak terarah.

Rencana Kinerja Tahunan Bagian Organisasi & Tatalaksana Setda Kab. Rote Ndao Tahun 2019 merupakan perencanaan kinerja yang menjabarkan potret permasalahan serta indikasi kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan dimaksud secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD, dengan mengutamakan kewenangan wajib disusul kewenangan lainnya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan. Rencana Kinerja Bagian Organisasi &



Tatalaksana Setda Kab. Rote Ndao ini merupakan alat ukur yang bermanfaat untuk mengecek apakah Perangkat Daerah dapat melaksanakan tugas yang telah dibebankan dan mengukur seberapa besar pencapaian target–target yang telah ditetapkan.

Selain itu dengan rencana kinerja akan lebih mudah mengukur tingkat capaian kinerja pemerintah pada akhir tahun 2019 karena dapat segera dilakukan perbandingan antara rencana dan realisasi dengan menggunakan sedapat mungkin lima indikator kinerja yaitu masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Selain Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan, Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2015 tanggal 19 September 2015 menjadi acuan dalam penyusunan LKIP, RKT dan PK tahun 2019.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kab. Rote Ndao tahun 2019 mengacu pada APBD Tahun 2019, Strategi dan Prioritas APBD Tahun 2019 dan DPA Perangkat Daerah Tahun 2019.

Perjanjian Kinerja Pemerintah Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kab. Rote Ndao Tahun 2019 adalah dengan uraian sebagai berikut:



Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2019

SASARAN		INDIKATOR		TARGET
1		2		3
1	Terpenuhinya akuntabilitas kinerja pemerintah	1.1	Jumlah Dokumen LKIP Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 yang tersusun	1 Dok
		1.2	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja 2019 Pemerintah Daerah yang tersusun	1 Dok
		1.3	Jumlah Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2019 yang tersusun	1 Dok
		1.4	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Capaian Kinerja	1 Dok
2	Terciptanya profesionalisme dan disiplin kerja aparatur dalam mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik	2.1	Jumlah Peserta Bimtek SAKIP PD	44 Orang
		2.2	Jumlah Peserta Bimtek Standar Pelayanan Minimal	25 Orang
3	Terpenuhinya administrasi Standar Ketatalaksanaan OPD	3.1	Jumlah Dokumen SOP- AP dan SPP yang tersusun	2 dok
		3.2	Jumlah Dokumen Anjab PD yang tersusun	3 dok
		3.3	Jumlah Dokumen Road Map Birokrasi Kab.Rote Ndao yang tersusun	1 dok



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Rote Ndao merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Program dan Kegiatan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, misi yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki Perangkat Daerah.

Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi organisasi.

A. AKUNTABILITAS KINERJA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA SETDA KABUPATEN ROTE NDAO

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari sasaran melalui instrument pertanggung jawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Dalam menjalankan Program dan Kegiatan, Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Rote Ndao didukung oleh Perangkat Daerah untuk melaksanakan pelayanan kepada publik maupun aparatur sebagai upaya mengimplementasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014-2019. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi dengan capaian kinerja tahun sebelumnya (Tahun Lalu 2018). Acuan untuk menilai kinerja Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Rote Ndao adalah Renstra (2014-2019), RKT 2019 dan Perjanjian Kinerja 2019. Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU)/Key Performance Indikator merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas yang bersifat strategis.



Dalam melakukan pengukuran capaian kinerja digunakan metode :

CAPAIAN KINERJA

1. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

- a) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$



Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja sasaran untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

2. Metode Penyimpulan Capaian Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- $X \geq 85\%$: Sangat Berhasil
- $70\% \leq X < 85\%$: Berhasil
- $55\% < X < 70\%$: Cukup Berhasil
- $X \leq 55\%$: Belum Berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 maka dapat di jelaskan sebagai berikut :

SASARAN 1	Meningkatnya Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
------------------	---

Sasaran ini diarahkan dalam rangka terwujudnya akuntabilitas kinerja pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao

Program yang mendukung sasaran ini adalah Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, melalui kegiatan-kegiatan yaitu :

- a. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 80.000.000,- (*Delapan Puluh Juta Rupiah*), terealisasi sebesar Rp.79.969.000,- (*Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) atau sebesar 99,96 %.
- b. Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah didukung dengan anggaran sebesar Rp.63.400.000,- (*Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*)



terrealisasi sebesar Rp.63.089.600,- (*Enam Puluh Tiga Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah*) atau sebesar 99,51 %

- c. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan didukung dengan anggaran sebesar Rp.70.000.000,- (*Tujuh Puluh Juta Rupiah*) terrealisasi sebesar Rp. 67.683.000,- (*Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah*) atau sebesar 96,69 %

Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terpenuhinya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2018	2019		Capaian (%)	Tahun Akhir Renstra
				Target	Realisasi		
1.	Jumlah LKIP Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 yang tersusun	Dokumen	1	1	1	100	1
2.	Jumlah Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah tahun 2019 yang tersusun	Dokumen	1	1	1	100	1
3.	Jumlah Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2019 yang tersusun	Dokumen	1	1	1	100	1
4	Monitoring, Evalausi dan Pelaporan capaian kinerja SKPD	Dokumen	1	1	1	100	1
				Rata-Rata		100	



Penjelasan dari pencapaian indikator capaian kinerja sasaran ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Penyusunan dokumen LKIP Kabupaten Rote Ndao di tahun 2019 ditargetkan 1 dokumen terealisasi 1 dokumen. Dengan capaian indikator kinerja 100%, setelah dilakukan evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap LKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao di Tahun 2018 Kabupaten Rote Ndao memperoleh nilai C.
2. Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah yang tersusun di tahun 2019 target 1 dokumen terealisasi 1 dokumen. Dengan capaian indikator kinerja 100%
3. Penyusunan dokumen Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah yang tersusun di tahun 2019 target 1 dokumen terealisasi 1 dokumen. Dengan capaian indikator kinerja 100%
4. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan capaian kinerja SKPD di tahun 2019 target 1 dokumen terealisasi 1 dokumen. Dengan capaian indikator kinerja 100%

SASARAN 2	Terciptanya profesionalisme dan disiplin kerja aparatur dalam mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik
------------------	--

Sasaran ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas kapasitas organisasi melalui Bimtek SAKIP dan Bimtek Standar Pelayanan Minimal.

Program yang mendukung sasaran ini adalah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur alokasi anggaran Rp.100.000.000,-, realisasi keuangan sebesar Rp. 96.785.000 (96,77%) dan realisasi fisik 100%, melalui kegiatan-kegiatan yaitu :

- a. Bimtek Standar Pelayanan Minimal, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.85.000.000.-dengan realisasi keuangan sebesar Rp.82.723.400.- (97%) dan realisasi fisik 100%;
- b. Bimtek Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(SAKIP), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 96.765.000.- (96%) dan realisasi fisik 100%;



Tabel 3.2. **Terciptanya profesionalisme dan disiplin kerja aparatur dalam mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2018	2019		Capaian (%)	Tahun Akhir Renstra
				Target	Realisasi		
1.	Jumlah Peserta Bimtek SAKIP	Orang	-	44	44	100	
2	Jumlah Peserta Bimtek SPM	Orang	-	25	25	100	
				Rata-Rata		100%	

Penjelasan dari pencapaian indikator kinerja sasaran ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Bimtek SAKIP Tahun 2019 dengan jumlah Peserta sebanyak 44 Orang, terealisasi 44 Orang dengan Presentase 100% yang pesertanya terdiri dari perwakilan dari masing-masing Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
2. Pelaksanaan Bimtek SPM Tahun 2019 dengan jumlah Peserta sebanyak 25 Orang, terealisasi 25 Orang dengan Presentase 100% yang pesertanya terdiri dari perwakilan dari masing-masing Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao yang menangani pelayanan publik.

Dari penjelasan diatas disimpulkan bahwa capaian kinerja indikator **Terciptanya profesionalisme dan disiplin kerja aparatur dalam mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik** adalah **100%** dikategorikan **Sangat Berhasil**.



SASARAN 3	Terpenuhinya administrasi Standar Ketatalaksanaan OPD
------------------	--

Sasaran ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas kapasitas organisasi melalui Penyusunan SOP dan SPP, Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi dan Penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) Perangkat Daerah.

Program yang mendukung sasaran ini adalah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dengan alokasi anggaran Rp.638.400.000,-, realisasi sebesar Rp. 627.966.336,- (98%) melalui kegiatan-kegiatan yaitu :

- a. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.205.000.000,-, realisasi keuangan sebesar Rp. 201.474.036.- (98,28%) dan realisasi fisik 100%;
- b. Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Rote Ndao, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.115.000,000,-, realisasi keuangan sebesar Rp. 110.784.500.- (96,33%) dan realisasi fisik 100%;
- c. Penyusunan Analisis Jabatan Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000.-, realisasi keuangan sebesar Rp. 99.966.200.- (99,96%) dan realisasi fisik 100%;

Tabel 3.3. Terpenuhinya administrasi Standar Ketatalaksanaan OPD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	2019	Capaian	Tahun
----	-------------------	--------	-------	------	---------	-------

Terwujudnya Organisasi Perangkat Daerah Yang Proporsional dan Mampu Memberikan Pelayanan Yang Prima Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih



			Dasar 2018	Target	Realisasi	(%)	Akhir Renstra
1.	Jumla SOP- AP dan SPP yang tersusun	Dokumen	-	2	4	200	15
2	Jumlah Anjab PD yang tersusun	Dokumen	-	3	3	100	60
3	Jumlah Road Map Birokrasi Kab.Rote Ndao yang tersusun	Dokumen	-	1	1	100	
				Rata-Rata	133%		

Penjelasan dari pencapaian indikator kinerja sasaran ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jumlah SOP-AP dan SPP yang tersusun/ Tahun 2019 dengan jumlah dokumen sebanyak 2 dokumen, terealisasi 4 dokumen dengan Presentase 200% yang dokumen terdiri dari SOP AP dan SPP masing-masing Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
2. Jumlah Anjab PD yang tersusun Tahun 2019 dengan jumlah dokumen sebanyak 3 dokumen, terealisasi 3 dokumen dengan Presentase 100% yang dokumennya terdiri dari Anjab dari masing-masing Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
3. Jumlah Road Map Reformasi Birokrasi yang tersusun Tahun 2019 dengan jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen, terealisasi 1 dokumen dengan Presentase 100%

Dari penjelasan diatas disimpulkan bahwa capaian kinerja indikator Terpenuhinya administrasi Standar Ketatalaksanaan OPD adalah **133%** dikategorikan **Sangat Berhasil**.



B. REALISASI ANGGARAN

Akuntabilitas keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dalam rangka mewujudkan suatu sasaran yang telah ditetapkan.

Terkait pengelolaan keuangan daerah, tingkat akuntabilitas dapat disajikan dalam bentuk laporan realisasi anggaran yang memberikan informasi kinerja keuangan daerah berupa perbandingan antara anggaran dan realisasi keuangan dalam kurun waktu satu tahun. Adapun kinerja keuangan Bagian Organisasi dan Tata laksana Setda Kab. Rote Ndao Tahun Anggaran 2019 bersumber dari APBD dengan rinciannya dapat di gambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.4 Alokasi dan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Bagian ORTA Setda Kab. Rote Ndao Tahun Anggaran 2019

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTAE (%)
1	2	3	4	5
I	Belanja Tidak Langsung (Gaji dan Tunjangan Penghasilan)	-	-	-
II	Belanja Langsung	1.036.320.000,-	1.015.524.829,-	97,99 %
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	186.961.000,-	172.111.093,-	92,05%
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	25.959.000,-	25.959.000,-	100 %
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	638.400.000	627.966.336,-	98%
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	185.000.000,-	179.488.400	97,02



BAB IV P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai media untuk menjawab amanah yang diberikan oleh stakeholders kepada Pemerintah pada dasarnya adalah menyajikan kinerja tahunan dalam periode perencanaan strategik (Renstra) yang telah ditetapkan. Kinerja tahunan dimaksud adalah keberhasilan dan kegagalan pemerintah dalam hal ini Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Rote Ndao dalam pencapaian sasaran-sasaran yang telah disajikan dalam Rencana Kinerja (Renja) yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategi (Renstra).

Pemecahannya adalah dengan meningkatkan jumlah sumberdaya aparatur baik kualitas maupun kuantitas dan menambah jumlah anggaran agar proses pelaksanaan kegiatan benar-benar berhasil sesuai dengan apa yang telah ditargetkan.

Pencapaian kinerja demikian senantiasa diupayakan untuk ditingkatkan terus menerus pada tahun-tahun yang akan datang serta diupayakan agar setiap aspirasi masyarakat dan kepentingannya dapat terus terakomodasikan dalam APBD Kabupaten Rote Ndao setiap tahun, dimana APBD itu adalah merupakan kristalisasi dari prioritas-prioritas dan pencapaian-pencapaian yang harus diwujudkan setiap tahunnya.

Baa, 15 Januari 2020

Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana
Kab. Rote Ndao,



Drh. Agiyan Yus, M.Si
Pembina Tk. I

NIP. 19640528 199203 1 004